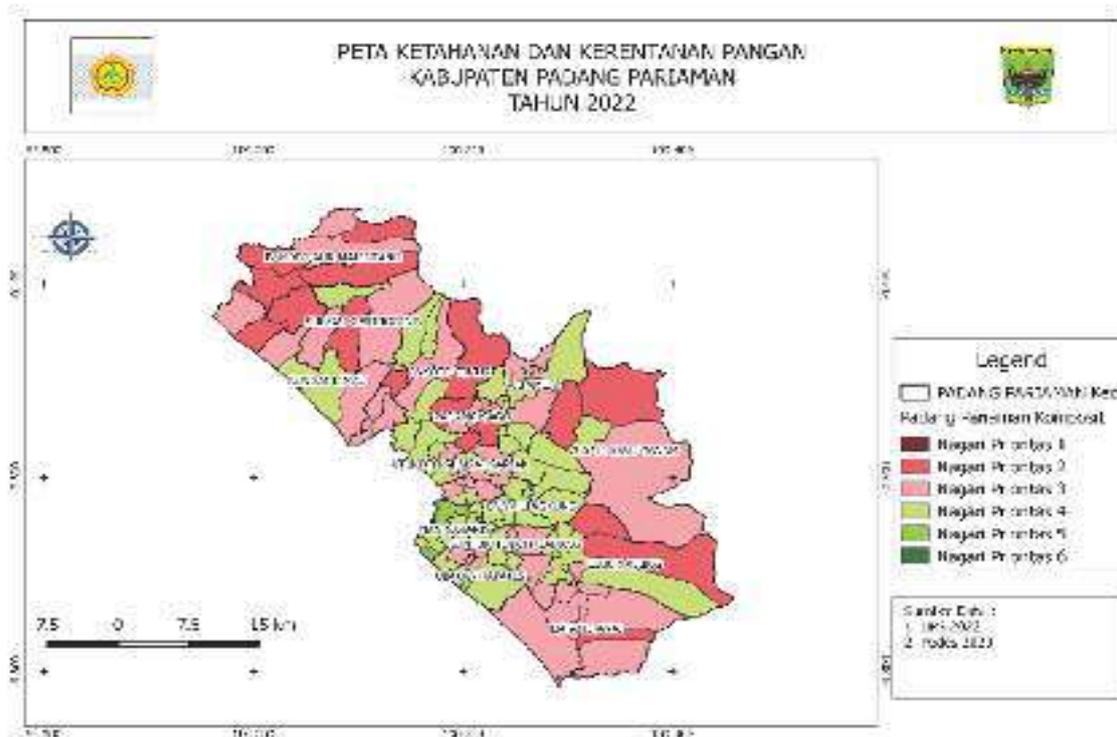


PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN / FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA)



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	6
1.3. Metodologi	11

BAB II KETERSEDIAAN PANGAN

2.1. Lahan Pertanian	19
2.2 Produksi	20
2.3. Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	25
2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	26

BAB III AKSES PANGAN

3.1. Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	28
3.2. Akses Trasportasi	30
3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan	31

BAB IV PEMANFAATAN PANGAN

4.1. Akses Air Bersih	33
4.2. Rasio Tenaga Kesehatan	35
4.3. Dampak dari Status Kesehatan	36
4.4 Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	39

BAB V KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

5.1. Kondisi Ketahanan Pangan	50
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	53

BAB VI REKOMENDASI KEBIJAKAN	54
-------------------------------------	-----------

LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ketahanan pangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; dan (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; dan (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; dan (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan/nagari diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan/nagari di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat

rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan/nagari di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA 2022 menunjukkan bahwa nagari rentan pangan prioritas 1-3 sebanyak 57 nagari dari 103 nagari (55,33%) yang terdiri 16 nagari (15,53%) Prioritas 2; dan 41 nagari (39,81%) Prioritas 3. Nagari prioritas 2 tersebar di 10 kecamatan diantaranya 1 nagari Kecamatan Batang Anai, VII Koto Sungai Sarik, V Koto Kampung Dalam, V Koto Timur, Sungai Geringging, 2 Nagari di Kecamatan Lubuk Alung, 2 x 11 Kayutanam, Padang Sago, Batang Gasan dan 3 Nagari di Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Nagari Prioritas 3 tersebar 41 Nagari di 14 kecamatan, antara lain 1 Nagari di Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, V Koto Timur, Batang Gasan; 2 Nagari di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Patamuan, Sungai Limau, Sungai Geringging, IV Koto Amal, 3 Nagari di Kecamatan Lubuk Alung, Padang Sago; 4 Nagari di Kecamatan Ulakan Tapakis; 5 Nagari di Kecamatan V Koto Kampung Dalam; 6 Nagari di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik dan 7 Nagari di Kecamatan Batang Anai.
7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan
 - a. Kondisi ekonomi, politik, sosial dan keamanan
 - b. Sarana dan prasarana publik yang baik
 - c. Teknologi yang dikembangkan
 - d. Jumlah lahan dalam menjaga ketahanan pangan
 - e. Iklim dan cuaca yang baik dapat mempengaruhi produktivitas pertanian
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan:
 - a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
 - b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
 - c. Penyediaan tenaga kesehatan
 - d. Jumlah lahan yang memadai dapat memungkinkan produktivitas komoditas pangan tercukupi.

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil menyelesaikan laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Tahun Anggaran 2022. Kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan /Food Security and Vulnerability Atlas di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data-data ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan.

Pola dan model analisis data secara teknis telah disesuaikan dengan metode yang ada, walaupun terdapat keterbatasan dana dan SDM, tetapi kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Hasil atau keluaran dari kegiatan ini adalah laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan / Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang kiranya dapat memberikan gambaran mengenai Nagari yang menjadi prioritas 1 sampai prioritas 6. Semoga dengan adanya laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan dan kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi penanganan nagari yang menjadi prioritas 1 sampai dengan prioritas 6.

Pariaman, Desember 2022

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Padang Pariaman



YURISMAN, SP, MM

Pejabat Utama Muda NIP.19740117 20003 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dan 103 (seratus tiga) nagari dengan total penduduk sebesar 433.018 jiwa (BPS) pada tahun 2021. Kabupaten Padang Pariaman secara astronomis terletak antara 0° 19' 15,68"- 0° 48' 59,868" Lintang Selatan dan antara 99° 57'43,325"- 100° 27' 28,94 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Padang Pariaman di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Agam, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Padang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Pariaman dan Samudera Indonesia. Kabupaten Padang Pariaman secara geografis yang memiliki wilayah daratan seluas 1.343,09 km² dan wilayah perairan (laut) panjang garis pantai adalah 42,11 km². Secara klimatologis, Kabupaten Padang Pariaman termasuk kategori daerah basah, karena memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun curah hujan 4.878,50 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 197 hari per tahun (Stasiun Meteorologi Minangkabau) atau curah hujan 5.333,30 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 233 hari per tahun (Stasiun Klimatologi Padang Pariaman) .

Wilayah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Kecamatan Lubuak Aluang, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan 2 x 11 Anam Lingsuang, Kecamatan VII Koto, Kecamatan V Koto, Kecamatan Sungai Garinggiang, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan IV Koto Aua Malintang, Kecamatan Ulakan Tapakih, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kecamatan VII Koto Padang Sago, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kecamatan VII Koto Patamuan, Kecamatan Anam Lingsuang (Berdasarkan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7

Tahun 2019). Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah yang paling luas, yakni 188,55 Km², setelah itu Kecamatan Batang Anai dengan luas wilayah 164,68 Km², kemudian Kecamatan Lubuak Aluang dengan luas wilayah 124,77 Km², dan Kecamatan Ulakan Tapakih yang memiliki luas terkecil, yakni 23,01 Km².

Kabupaten Padang Pariaman beberapa kecamatannya berbatasan dengan pantai antara lain : Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan V Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kecamatan Ulakan Tapakih dan Kecamatan Batang Anai. Ketinggian wilayah Kabupaten Padang Pariaman beragam yang terendah 25 m dari permukaan laut (Kecamatan Ulakan Tapakih) dan yang tertinggi 1.925 m dari permukaan laut (Kecamatan Patamuan).

Disamping memiliki pantai yang indah, Kabupaten Padang Pariaman juga dilewati oleh 11 (sebelas) sungai yaitu Batang Anai sepanjang 54,6 Km, Batang Tapakis sepanjang 46,0 Km, Batang Mangau sepanjang 46,0 Km, Batang Naras sepanjang 20,0 Km, Batang Gasan sepanjang 20,0 Km, Batang Ulakan sepanjang 19,0 Km, Batang Sungai Sirah sepanjang 18, 0 Km, Batang Paingan sepanjang 16,0 Km, Batang Sungai Limau sepanjang 14,0 Km, Batang Kamumuan sepanjang 12,0 Km dan Batang Piaman sepanjang 12,0 Km.

Penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 430.626 jiwa, dan tahun 2021 meningkat menjadi 433.018 jiwa, dengan komposisi 216.308 jiwa penduduk laki-laki dan 216.710 jiwa penduduk perempuan.

Berpedoman pada luas wilayah 1.343,09 km² dan jumlah penduduk 433.018 jiwa pada tahun 2021, maka kepadatan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebanyak 322 jiwa/km². Berturut-turut Kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi adalah (1) Kecamatan Ulakan Tapakih dengan kepadatan penduduk sebanyak 902 jiwa/km²; (2) Kecamatan Anam Lingkuang dengan kepadatan penduduk sebanyak 604 jiwa/km²; (3)

Kecamatan Sintuak Toboh Gadang dengan kepadatan penduduk sebanyak 593 jiwa/km², (4) Kecamatan VII Koto dengan kepadatan penduduk sebanyak 561 jiwa/km², (5) Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkuang dengan kepadatan penduduk sebanyak 461 jiwa/km²; (6) Kecamatan Nan Sabaris dengan kepadatan penduduk sebanyak 457 jiwa/km², (7) Kecamatan Lubuk Aluang dengan kepadatan penduduk sebanyak 378 jiwa/km²; (8) Kecamatan V Koto dengan kepadatan penduduk sebanyak 354 Jiwa/km², (9) Kecamatan Sungai Limau dengan kepadatan penduduk sebanyak 330 jiwa/km², (10) Kecamatan Batang Anai dengan kepadatan penduduk sebanyak 325 jiwa/km²; (11) Kecamatan Sungai Garinggiang dengan kepadatan penduduk sebanyak 299 jiwa/km² (12) Kecamatan IV Koto Aua Malintang dengan kepadatan penduduk sebanyak 252 jiwa/km², (13) Kecamatan VII Koto Padang Sago dengan kepadatan penduduk sebanyak 249 jiwa/km²; (14) Kecamatan VII Koto Patamuan dengan kepadatan penduduk sebanyak 226 jiwa/km², (15) Kecamatan V Koto Timur dengan kepadatan penduduk sebanyak 218 jiwa/km², (16) Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam dengan kepadatan penduduk sebanyak 149 jiwa/km²; dan yang terakhir adalah Kecamatan Batang Gasan dengan kepadatan. penduduk sebanyak 144 jiwa/km².

Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas Dasar harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 dan kembali meningkat pada tahun 2021, namun peningkatannya belum signifikan. Pada tahun 2021 Nilai PDRB Atas Dasar Harga berlaku meningkat sebesar Rp520.273,43 juta, dari Rp17.934.814,60 juta pada tahun 2020 menjadi Rp18.455.088,03 juta di tahun 2021. Begitu juga dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan, juga meningkat menjadi Rp12.199.848,45 juta di tahun 2021 dari Rp11.939.479,19 juta tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 2,18 persen. Namun peningkatan ini masih sangat kecil jika

dibandingkan dengan penurunan PDRB yang terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar -10,46 persen

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman sebesar 5,58 persen, terus mengalami penurunan menjadi 2,4 persen pada tahun 2019, dan menurun drastis di tahun 2020 yakni pada posisi -10,46 dan kembali meningkat sebesar 2,18 persen pada tahun 2021. Penurunan yang cukup besar pada tahun 2020 tersebut disebabkan oleh lesunya kegiatan ekonomi pada semua sektor ekonomi terutama pada sektor transportasi udara, penurunan jumlah penumpang angkutan udara akibat adanya kebijakan PPKM di era pandemi covid-19 dan mahal nya harga tiket. Namun dengan adanya pemulihan ekonomi pada beberapa sektor usaha pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan sebesar 12,64 persen.

Selama lima tahun terakhir (2017 – 2021) struktur perekonomian Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Transportasi dan pergudangan; Industri Pengolahan; Perdagangan besar dan eceran, dan Konstruksi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 22,65 % (angka ini naik dari 19,33 % di tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu mencapai 13,57 % (turun dari 33,42 % di tahun 2017). Disusul oleh lapangan usaha industry Pengolahan sebesar 11,95 % (naik dari 10,20 % di tahun 2017). Berikutnya, kontribusi lapangan usaha Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor sebesar 10,65 % (naik dari 8,27% di tahun 2017) dan lapangan usaha konstruksi sebesar 10,66 % (naik dari 7,32% di tahun 2017).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamankan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten/Kota dengan analisis sampai tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat

sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten/Kota pada tahun 2022.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten/Kota menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten/Kota akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya

berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

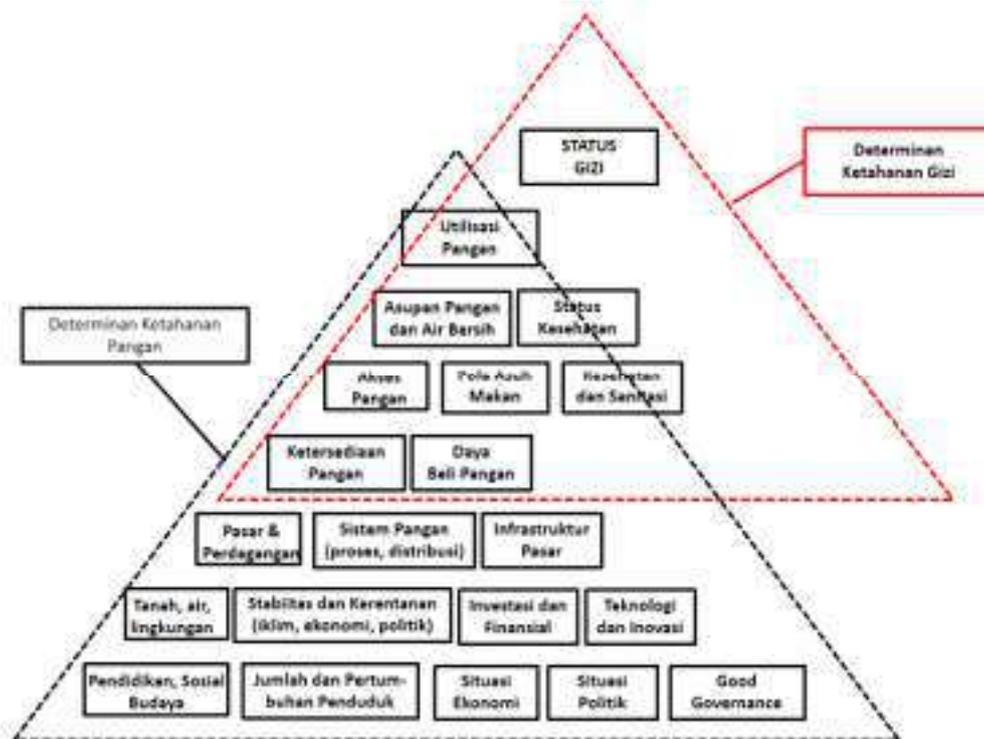
Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan hygiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai ketahanan pangan dan gizi seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi

(Sumber: FAO dan UNSCN)

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan metabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dan lain-lain.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten/Kota didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat

sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2022

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk nagari	- Kabupaten dalam angka tahun 2022 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga nagari	- Kecamatan dalam angka 2022, Podes 2020/BPS
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk nagari	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk nagari	Update Potensi Desa 2020, BPS

Indikator	Definisi	Sumber Data
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Nagari dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Nagari dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Update Potensi Desa 2020, BPS
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga nagari	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga nagari	Data Terpadu PPFM, SK Jan 2019
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk nagari	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk nagari	Potensi Desa 2019, BPS

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk nagari	1/6	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga nagari	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk nagari	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3

c. Mengelompokkan desa/kelurahan/nagari ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K_j = \sum_{i=1}^5 a_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan/nagari yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan/nagari yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan³. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 103 nagari di Kabupaten Padang Pariaman, 9 nagari masuk dalam prioritas 1 (8.73%), 18 nagari prioritas 2 (15.53 %) dan 24 nagari prioritas 3 (20.40 %). Dimana dari sebaran luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduknya dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Nagari	Persentase
1	0.3551	9	8,74
2	0.3428	18	17,48
3	0.3317	24	23,30
4	0.3141	18	17,48
5	0.2983	17	16,50
6	0	17	16,50

³ Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan

2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 22,65 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Padang Pariaman yang menyumbang hampir 97,42 % dari total produksi serealial kabupaten. Berdasarkan Tabel 2.2 dan, produksi umbi-umbian di Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan dan penurunan sejak tahun 2017. Peningkatan dan penurunan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya luas tanam dan peningkatan produktivitas. Produksi padi dari pencapaian produksi 321.376 ton tahun 2017 menjadi 252.723 pada tahun 2021.

Tabel 2.2 Produksi Serealial Pokok dan Umbi-umbian 2017 - 2021 (Ton)

Serealial	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata 5 tahun
Padi	321.376	280.892	293.360	283.127	252.723	286.296
Jagung	80.270	60.524	53.467	33.945	53.462	56.334
Ubi Kayu	11.725	7.705	10.297	7.507	8.142	9.075

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2017-2021, BPS

Tahun 2021, total produksi sereal dan umbi-umbian mencapai 252.723 ton padi, 53.462 ton jagung, 8.142 ton ubi kayu. Total produksi sereal dan laju pertumbuhan produksi tahun 2017-2021 menunjukkan penurunan sebesar 23,96 %, yaitu dari total produksi tahun 2017 sebesar 413.371 ton menjadi 314.327 ton pada tahun 2021. Sebaran total produksi sereal selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 413.371 ton dan terkecil pada tahun 2021 yaitu sebesar 314.327. Produksi sereal pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Produksi Total Sereal per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2017-2021)

Kecamatan	Produksi Total Sereal				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Batang Anai	66.450,2	52.193,17	47.752,51	44.125,40	40.431,31
2. Lubuk Alung	91.774,56	75.812,5	77.092,7	56.501,64	54.098,22
3. Sintuk Toboh Gadang	18.548,23	16.003,7	17.261,32	13.541,97	14.483,44
4. Ulakan Tapakis	24.644,96	17.995,9	20.287,86	19.742,24	21.708,22
5. Nan Sabaris	17.234,58	15.208,08	15.423,61	14.333,1	19.652,69
6. 2 x 11 Enam Lingkung	9.621,75	8.498,58	8.775,9	6.268,64	8.032,07
7. Enam Lingkung	19.972,00	21.640,19	19.665,94	20.578,98	14.801,24
8. 2 x 11 Kayutanam	25.619,38	20.300,93	18.464,55	21.550,35	17.865,23
9. VII Koto	23.476,60	17.748,78	19.646,19	18.678,70	18.917,09
10. Patamuan	16.741,77	9.792,43	13.417,69	14.165,01	14.391,08
11. Padang Sago	4.888,20	4.569,61	4.539,05	4.428,26	4.633,79
12. V Koto Kpg Dalam	11.932,00	12.896,28	13.452,20	12.663,09	10.538,33
13. V Koto Timur	9.006,74	8.725,42	8.647,12	7.076,84	7.931,66
14. Sungai Limau	16.570,07	15.670,91	17.746,57	17.307,39	16.558,91
15. Batang Gasan	11.197,51	13.253,69	12.162,61	11.433,27	12.809,08
16. Sungai Garinggiang	17.917,27	16.140,90	15.695,60	16.772,87	15.309,66
17. IV Koto Aur Malintang	27.293,32	22.751,59	27.102,89	25.412,21	22.165,83
Jumlah	412.889,44	354.301,18	357.124,31	324.579,95	314.327,85

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2017-2021, BPS

Padi

Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman selama 5 tahun terakhir (2017-2021) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2017 hampir di semua kecamatan. Peningkatan terjadi di kecamatan Batang Anai, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, Nan Sabaris, 2 x 11 Kayutanam, VII Koto, Patamuan, Padang Sago, Sungai Geringging, dan IV Koto Aur Malintang. Produksi padi tertinggi di kecamatan Lubuk Alung sebesar 51.037,30 ton.

Tabel 2.4 Produksi Padi 2017 - 2021 (Ton)

Kecamatan	Padi				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Batang Anai	39.742,92	34.730,35	37.943,48	38.938,63	27.207,43
2. Lubuk Alung	51.037,30	47.716,85	49.465,22	42.305,67	33.841,70
3. Sintuk Toboh Gadang	15.825,28	13.713,10	14.767,92	12.066,87	11.896,05
4. Ulakan Tapakis	23.092,96	17.412,85	18.331,20	18.331,20	20.293,00
5. Nan Sabaris	15.974,03	14.646,55	14.646,04	13.477,00	18.487,90
6. 2 x 11 Enam Lingkung	9.170,00	7.919,23	8.404,50	5.941,84	7.260,43
7. Enam Lingkung	15.977,36	18.271,24	17.239,34	17.521,93	11.062,80
8. 2 x 11 Kayutanam	24.633,73	19.784,81	18.421,35	21.456,90	17.580,43
9. VII Koto	22.039,91	16.336,11	17.032,26	16.606,08	17.240,18
10. Patamuan	16.741,77	9.792,43	12.884,40	14.005,17	14.376,86
11. Padang Sago	4.880,20	4.200,00	4.305,15	4.222,10	4.312,22
12. V Koto Kpg Dalam	11.813,00	12.536,45	13.336,20	12.513,60	10.192,73
13. V Koto Timur	8.620,66	8.374,35	8.243,92	6.846,84	7.746,54
14. Sungai Limau	15.881,32	14.987,73	16.762,08	16.774,27	13.778,90
15. Batang Gasan	9.946,51	10.470,57	9.275,83	9.382,62	9.946,84
16. Sungai Geringging	14.726,95	12.996,14	12.127,50	14.639,52	12.426,45
17. IV Koto Aur Malintang	21.272,10	17.003,21	20.173,92	18.097,49	15.072,79
Jumlah	321.376,00	280.892,00	293.360,31	283.127,72	252.723,26

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2017-2021, BPS

Jagung

Pada tahun 2021, produksi jagung mencapai 53.462,00 ton. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan 57,49 %. Peningkatan produksi pada tahun 2021 disebabkan karena ada beberapa daerah jaringan irigasi kurang lancar dan keinginan masyarakat karna harga jagung lebih tinggi sehingga banyak yang menanam jagung. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 80.270 ton. Kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Lubuk Alung sebesar 39.509,55 ton, menyusul Kecamatan Batang Anai sebesar 23.150,76 ton dan terendah Kecamatan Patamuan sebesar 0 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Produksi Jagung 2017 - 2021 (Ton)

Kabupaten	Jagung				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Batang Anai	23.150,76	14.706,66	6.926,21	3.627,00	11.557,73
2. Lubuk Alung	39.509,55	27.251,64	25.942,68	13.737,87	19.762,60
3. Sintuk Toboh Gadang	2.621,23	2.055,40	1.851,85	1.219,40	2.445,59
4. Ulakan Tapakis	1.494,00	507,75	1.872,56	1.137,60	1.381,28
5. Nan Sabaris	348,50	269,37	308,31	471,20	666,81
6. 2 x 11 Enam Lingkung	161,50	317,25	242,76	100,63	214,20
7. Enam Lingkung	847,45	800,58	925,60	891,25	1.265,48
8. 2 x 11 Kayutanam	389,50	438,84	43,20	93,45	284,80
9. VII Koto	1.263,08	1.073,37	552,00	157,50	241,71
10. Patamuan	0	0	533,29	159,84	14,22
11. Padang Sago	8,00	318,75	34,50	0	0
12. V Koto Kpg Dalam	119,00	359,83	116,00	149,49	345,60
13. V Koto Timur	34,00	249,75	403,20	230,00	185,12
14. Sungai Limau	539,50	631,68	902,92	533,12	2.780,01
15. Batang Gasan	1.192,00	2.757,55	2.805,28	2.050,65	2.862,24
16. Sungai Garinggiang	3.190,32	3.063,07	3.321,38	2.004,60	2.776,11
17. IV Koto Aur Malintang	5.401,62	5.722,50	6.685,25	7.181,84	6.678,50
Jumlah	80.270,00	60.524,00	53.467,04	33.945,44	53.462,00

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2017-2021, BPS

Ubi Kayu

Produksi ubi kayu menurun dari 11.725,00 ton pada tahun 2017 menjadi 8.142,60 ton pada tahun 2021. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar pada tahun 2021 meliputi kecamatan Enam Lingkung Rincian produksi ubi kayu tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Produksi Ubi Kayu 2017 - 2021 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Batang Anai	3.556,52	2756,16	2.882,82	1.559,77	1.666,15
2. Lubuk Alung	1.227,71	844,01	1.684,80	458,10	493,92
3. Sintuk Toboh Gadang	101,72	235,20	641,55	255,70	141,80
4. Ulakan Tapakis	58,00	75,30	84,10	73,44	33,94
5. Nan Sabaris	912,05	292,16	469,26	384,90	497,98
6. 2 x 11 Enam Lingkung	290,25	261,10	128,64	226,17	557,44
7. Enam Lingkung	3.147,19	2.568,37	1.491,00	2.165,80	2472,96
8. 2 x 11 Kayutanam	138,20	77,28	0	0	0
9. VII Koto	1.047,19	339,30	2.061,93	1.915,12	1.435,20
10. Patamuan	0	0	0	0	0
11. Padang Sago	65,60	50,86	199,40	206,16	321,57
12. V Koto Kpg Dalam	0	0	0	0	0
13. V Koto Timur	352,06	101,32	0	0	0
14. Sungai Limau	149,25	51,50	81,52	0	0
15. Batang Gasan	59,00	25,57	81,50	0	0
16. Sungai Garinggiang	0	81,69	246,72	128,75	107,10
17. IV Koto Aur Malintang	619,60	25,88	243,72	132,88	414,54
Jumlah	11.725,00	7.786,69	10.296,96	7.506,79	8.142,60

Sumber: Kabupaten Dalam Angka 2017-2021, BPS

2.3. SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 103 nagari di Kabupaten Padang Pariaman ada 7 nagari masuk dalam prioritas 1 (6,8 %), 0 nagari prioritas 2 (0 %) dan 46 nagari prioritas 3 (44,66 %) (Peta 02).

Tabel 2.1 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Nagari	Persentase
1	1	0,1514	7	6,80
2	2	0,1318	0	0
3	3	0,1139	46	44,66
4	4	0,0946	24	23,30
5	5	0,0670	13	12,62
6	6	0	13	12,62

2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

Strategi dasar pengembangan Kabupaten Padang Pariaman ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengarahkan pengembangan kawasan sesuai dengan kebijaksanaan pengembangan yang telah digariskan. Jadi pada dasarnya strategi ini, sebagai media dalam menentukan rencana pengembangan kabupaten lebih lanjut agar sesuai dengan apa yang dimiliki atau keadaan potensi dan masalah di wilayah perencanaan. Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang. Mengacu pada klausul kebijakan yang telah dirumuskan di atas serta dikaitkan dengan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman, maka strategi penataan ruang seperti:

1. Strategi peningkatan produktivitas kegiatan pertanian wilayah melalui program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian :
 - a) Menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kabupaten dan pembatasan pembangunan prasarana yang memotong kawasan persawahan untuk mempertahankan fungsinya sebagai aset kabupaten dalam rangka mendukung program strategis ketahanan pangan nasional;

- b) mengupayakan peningkatan kegiatan intensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pada lahan tidak terbangun dan lahan sisa yang berupa lahan cadangan pengembangan sebagai lahan pertanian khususnya areal persawahan beririgasi teknis dan mekanisasi dengan penggunaan alat-alat pertanian modern;
 - c) memperkuat kelembagaan bagi petani seperti pemberian kredit, manajemen pemasaran dan distribusi produk pertanian.
2. Strategi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui program kegiatan pemantauan dan pengawasan dibidang perdagangan meliputi, pemantauan ketersediaan, distribusi dan harga barang pokok di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

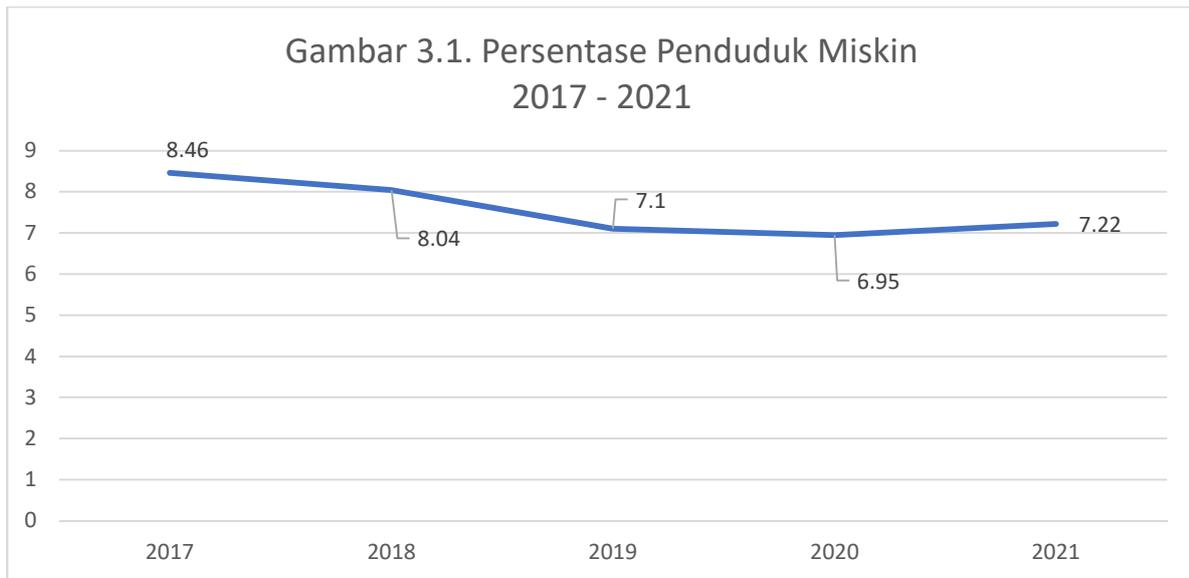
BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik:** keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami penurunan dari 8,46% (34,70 ribu jiwa) tahun 2017 menjadi 7,22 % (30,41 ribu jiwa) tahun 2021.



Sumber: Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka 2022, BPS

Pada tahun 2021, terdapat 17 nagari yang memiliki rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 0,0677 (16,50 %) masuk prioritas 1, kemudian sebanyak 19 nagari (18,45 %) masuk prioritas 2, dan 18 nagari (17,47%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 54 nagari tersebut (Peta 03).

Tabel 3.1 Sebaran nagari dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah	Jumlah Nagari	Persentase
1	0,0677	17	16,50
2	0,0496	19	18,45
3	0,0342	18	17,47
4	0,0178	20	19,42
5	0,0101	20	19,42
6	0,0000	9	8,74

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2020, BPS, di Kabupaten Padang Pariaman hampir semua nagari memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun, namun ada 1 nagari yang kurang memadai akses penghubungnya yaitu di Kecamatan VII Koto Sungai Saria di Nagari Lareh Nan Panjang Barat yang merupakan Nagari pemekaran di Kabupaten Padang Pariaman. Dimana dalam pemetaan FSVA bernilai 4 yang berarti untuk akses penghubung di Kabupaten Padang Pariaman tidak ada permasalahan sehingga dapat dilalui oleh kendaraan sepanjang tahunnya (Peta 04).

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya:

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar essential masyarakat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) paling tidak untuk kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan
- Perlindungan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial yang ditujukan bagi kelompok PPKS keluarga miskin yang termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin

- Perlindungan dan jaminan sosial terutama dalam aspek alam dan atau sosial terutama dalam aspek ketersediaan kebutuhan dasar esensial pada saat bencana dan pasca bencana.
- Meningkatkan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) bertujuan untuk menguatkan peran-peran PPKS dalam penanganan berbagai masalah sosial yang ada.
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat nagari/perdesaan/kelurahan
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agribisnis dan agroindustri
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh

BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk nagari/desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak⁴. Kualitas Air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif. Pengawasan kualitas air bertujuan untuk mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan

⁴ Permenkes 416 Tahun 1990

membahayakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Dari 103 nagari, di Kabupaten Padang Pariaman 32 nagari masuk dalam prioritas 1 (31,07 %), 21 nagari prioritas 2 (20,39 %), 18 nagari prioritas 3 (17,47 %), 10 nagari masuk prioritas 4 (9,71%), 9 nagari masuk prioritas 5 (8,74%) dan 13 nagari prioritas 6 (12,62 %) (Peta 05).

Tabel 4.1 Sebaran nagari berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih	Jumlah Nagari	Persentase
1	0,2661	32	31,07
2	0,1492	21	20,39
3	0,0775	18	17,47
4	0,0455	10	9,71
5	0,0212	9	8,74
6	0,0000	13	12,62

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk nagari per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk nagari per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk nagari per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di nagari berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan	Jumlah nagari	Persentase
1	3,1999	35	33,98
2	1,5007	22	21,36
3	0,7438	26	25,24
4	0,4708	5	4,85
5	0,2960	6	5,83
6	0	9	8,74

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah balita stunting di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 sebanyak 2.339 balita. Jumlah balita stunting yang tinggi ditemukan di Kecamatan Sungai Limau sebanyak 271 balita dan terendah ditemukan di Kecamatan Batang Gasan sebanyak 27 balita. Tingginya jumlah balita stunting pada tahun 2021 disebabkan oleh banyak faktor antara lain; (1) kesejahteraan penduduk yang rendah, apalagi tahun 2021 adalah pasca pandemi yang menyebabkan masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga; (2) keadaan sanitasi yang tidak bagus dan sumber air bersih yang tidak memadai; (3) pola asuh dan pengetahuan ibu yang rendah dalam pemberian makanan untuk balita; (4) adanya infeksi/penyakit.

Tabel 4.3 Data Balita Stunting Kab. Padang Pariaman Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Batang Anai	75
2	Lubuk Alung	263
3	Sintuk Toboh Gadang	108
4	Ulakan Tapakis	79
5	Nan Sabaris	196
6	2 x 11 Enam Lingkung	97
7	Enam Lingkung	183
8	2 x 11 Kayutanam	167
9	Patamuan	70
10	VII Koto Sungai Sarik	136
11	Padang Sago	33
12	V Koto Kampung Dalam	157
13	V Koto Timur	134
14	Sungai Limau	271
15	Batang Gasan	27
16	Sungai Geringging	245
17	IV Koto Aur Malintang	98
	Kab. Padang Pariaman	2.339

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 adalah 30 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 ada sebanyak 0 jiwa. Angka kematian balita tertinggi tahun 2021 terdapat di Kecamatan Ulakan Tapakih dan Kecamatan 2 x 11 Anam Lingkung (4 jiwa) dan terendah tahun 2021 terdapat di Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, VII Koto Patamuan, V Koto Timur dan Sungai Garingging (0 jiwa). Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi tahun 2021 di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 0 jiwa.

Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Jumlah Kematian Balita dan Kematian Ibu per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu
1	Batang Anai	2	2
2	Lubuk Alung	2	1
3	Sintuk Toboh Gadang	2	1
4	Ulakan Tapakis	4	0
5	Nan Sabaris	3	1
6	2 x 11 Enam Lingkung	5	0
7	Enam Lingkung	1	0
8	2 x 11 Kayutanam	0	0
9	Patamuan	0	0
10	VII Koto Sungai Sarik	1	1
11	Padang Sago	3	0

12	V Koto Kampung Dalam	3	1
13	V Koto Timur	0	0
14	Sungai Limau	2	0
15	Batang Gasan	2	1
16	Sungai Geringging	0	0
17	IV Koto Aur Malintang	1	1
	Kab. Padang Pariaman	31	9

4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya perbaikan pangan dan gizi adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi sebagaimana target yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Padang Pariaman tahun 2021-2025 khususnya dalam bidang pangan dan gizi tercantum pada Tabel 4.1

Tabel 4.5 Indikator dan Sasaran Pangan

No	Indikator	Status Awal 2021	Target 2025
1.	Produksi padi (ton)	287.374,00	305.008,00
2.	Produktivitas pangan Utama (ton) per hektar	4,8 %	5,29 %
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,50	90,10

Sumber : Dokumen RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2021-2025

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kabupaten Padang Pariaman, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga

sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasinya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:

- a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
- c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
- d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi

disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):

- Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
- Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
- Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
- Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan

komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.

- Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
- Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.

b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Dalam penanganan penurunan prevalensi stunting Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan 5 pilar penanganan yang telah ditetapkan pemerintah pusat yaitu;

1. Komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara
2. Kampanye nasional berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas
3. Konvergensi koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat
4. Gizi dan Ketahanan pangan
5. Pemantauan dan evaluasi

Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025, kebijakan terkait konsumsi di Kabupaten Padang Pariaman pada misi ke 2 yaitu Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas Dan Berbudaya. Dimana pada sasaran ke empatnya yaitu Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan Meningkatkan pembinaan ketersediaan dan distribusi pangan
2. Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan

3. Meningkatkan pembinaan budidaya peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil peternakan dan perikanan
5. Meningkatkan pembinaan budidaya pertanian
6. Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil pertanian

Masalah kesehatan ini merupakan akibat dari berbagai faktor yang terjadi pada masa lalu yaitu mulai dari pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupan (1000 hari pertama kehidupan) . Berbagai faktor tersebut antara lain asupan gizi yang buruk, pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktek pemberian makan bayi dan anak dan rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan *stunting*. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global.

Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi yang bersifat multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasinya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut bersifat multisektor. Pendekatan multisektor dalam pangan dan gizi sangat diperlukan karena perbaikan melalui intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30 persen dalam *stunting* pada anak

balita. Sedangkan kontribusi 70 persen lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitiv yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan.

Intervensi gizi sensitive tersebut antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan dan keluarga berencana. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi adalah dengan perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

1. Intervensi Gizi Spesifik

Kegiatan ini merupakan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 HPK. Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relative pendek.

Kegiatan intervensi Gizi Spesifik antara lain :

- a. Intervensi dengan Sasaran Ibu Hamil, antara lain
 - Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis
 - Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat
 - Mengatasi kekurangan iodium
 - Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil 5. Melindungi ibu hamil dari malaria.
- b. Intervensi dengan Sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan
 - Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI jolong/colostrum)
 - Mendorong pemberian ASI Eksklusif.
- c. Intervensi dengan Sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan
 - Mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI

- Menyediakan obat cacing
- Menyediakan suplementasi zink
- Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan
- Memberikan perlindungan terhadap malaria
- Memberikan imunisasi lengkap
- Melakukan pencegahan dan pengobatan diare.
- Kegiatan ini dilakukan oleh sektor kesehatan saja dan dari hasil penelitian hanya bisa berkontribusi sebesar 30 % pada penurunan *stunting*.

2. Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi sebesar 70 % pada penurunan *stunting*. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus pada 1.000 HPK. Kegiatan terkait intervensi gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakkan secara lintas sektor.

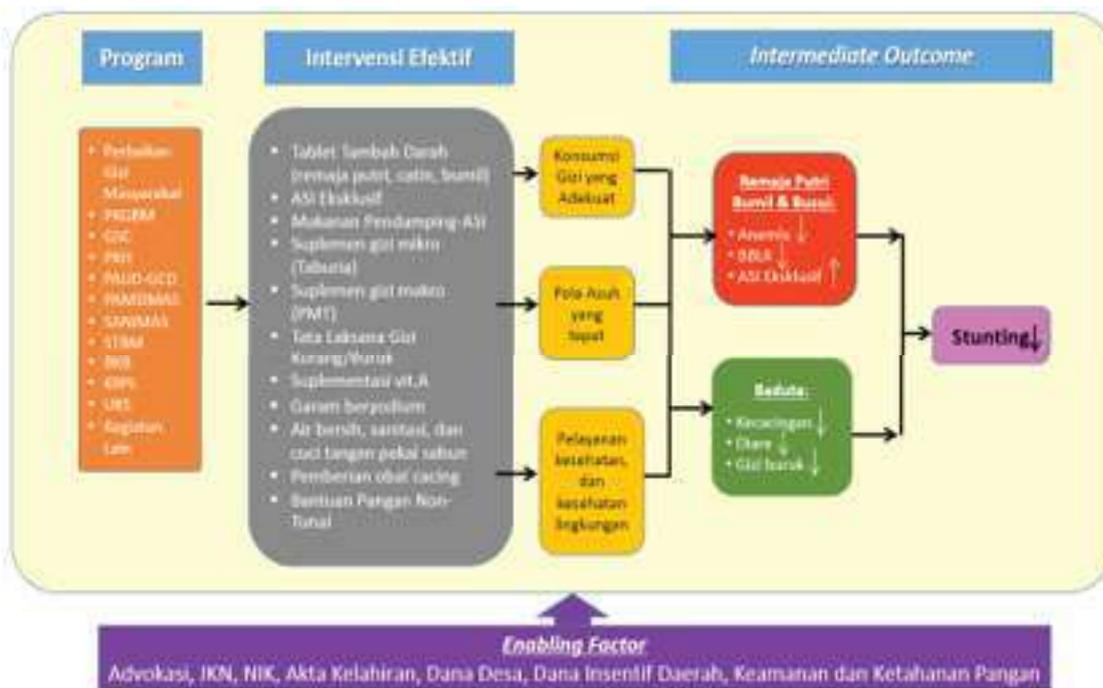
Ada beberapa kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif antara lain sebagai berikut :

- a. Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih.
- b. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.
- c. Melakukan forifikasi bahan pangan.
- d. Pemanfatan dana desa untuk penanggulangan masalah kesehatan dan gizi.
- e. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.
- f. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB).
- g. Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- h. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua.
- i. Memberikan pendidikan pada anak usia Dini (PAUD).

- j. Memberikan pendidikan gizi masyarakat.
- k. Memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja.
- l. Menyediakan bantuan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

Kedua kerangka intervensi *stunting* diatas adalah upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi *stunting* seperti terlihat pada gambar 3.

Gambar 3 Result Framework Pelaksanaan Intervensi Gizi Terintegrasi



Pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersamaan dan terintegrasi akan meningkatkan efektifitas penurunan masalah gizi. Selain integrasi, diperlukan dukungan faktor pemungkin yang akan memberikan kesempatan dan dorongan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Faktor pemungkin tersebut antara lain pengetahuan, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, kapasitas dan sumber pendanaan.

Investasi dibidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab 2, 3 dan 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 07) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, nagari-nagari dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (nagari) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (nagari) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (nagari) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (nagari) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 103 nagari/desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman maka didapatkan 16 nagari/desa/kelurahan masuk dalam prioritas 2, 41 nagari/desa/kelurahan masuk dalam prioritas 3, 45 nagari/desa/kelurahan masuk dalam prioritas 4, dan 1 nagari/desa/kelurahan masuk dalam prioritas 5.

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Nagari	Persentase
1	0	0
2	16	15,53
3	41	39,81
4	45	43,69
5	1	0,97
6	0	0

Nagari rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Batang Anai (1 Nagari) yaitu Nagari Sungai Buluh Selatan; Kecamatan Lubuk Alung (2 Nagari) yaitu Nagari Pasie laweh Lubuk Alung dan Nagari Salibutan Lubuk Alung; Kecamatan 2 x 11 Kayutanam (2 Nagari) yaitu Nagari Kapalo Hilalang dan Nagari Guguak; Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (1 Nagari) yaitu Nagari Ambuang Kapua Sungai Sariak; Kecamatan Padang Sago (2 Nagari) yaitu Nagari Koto Baru dan Nagari Koto Dalam Barat; Kecamatan V Koto Timur (1 Nagari) yaitu Nagari Gunung Padang Alai; Kecamatan Batang Gasan (2 Nagari) yaitu Nagari Malai V Suku dan Nagari Malai V Suku Timur; Kecamatan Sungai Geringging (1 Nagari) yaitu Nagari Kuranji Hulu dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang (3 Nagari) yaitu Nagari III Aur Malintang Selatan, Nagari III Koto Aur Malintang Timur dan Nagari Balai Baik Malai III Koto.

Nagari yang rentan terhadap kerawanan pangan pada prioritas 3 terdapat di 41 wilayah antara lain :

1. Kecamatan Batang Anai (7 Nagari) yaitu Nagari Katapiang, Kasang, Sungai Buluh, Buayan Lubuk Alung, Sungai Buluh Barat, Sungai Buluh Timur, dan Sungai Buluh Utara
2. Kecamatan Lubuk Alung (3 Nagari) yaitu Nagari Aie Tajun Lubuk Alung, Sikabu Lubuk Alung, dan Punggung Kasiak Lubuk Alung.
3. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang (2 Nagari) yaitu Nagari Sintuk dan Toboh Gadang Timur;
4. Kecamatan Ulakan Tapakis (4 Nagari) yaitu Nagari Sungai Gimba Ulakan, Sandi Ulakan, Kampuang Galapuang Ulakan dan padang Toboh Ulakan;
5. Kecamatan 2 x 11 Kayutanam (1 Nagari) yaitu Nagari Anduring;
6. Kecamatan VII Koto Sungai Sariak (6 Nagari) yaitu Nagari Balah Aia, Lareh Nan Panjang, Sungai Sariak, Balah Aie Utara, Limpato Sungai Sariak dan Bisati Sungai Sariak;
7. Kecamatan Patamuan (2 Nagari) yaitu Nagari Tandikat Utara dan Tandikat Selatan;
8. Kecamatan Padang Sago (3 Nagari) yaitu Nagari Koto Dalam, Koto Dalam Selatan dan Batu Kalang Utara;
9. Kecamatan V Koto Kampung Dalam (5 Nagari) yaitu Nagari Campago, Campago Selatan, Campago Barat, Sikucur Tengah dan Sikucur Timur;
10. Kecamatan V Koto Timur (1 Nagari) yaitu Nagari Kudu Gantiang Barat;
11. Kecamatan Sungai Limau (2 Nagari) yaitu Nagari Pilubang dan Guguak Kuranji Hilir;
12. Kecamatan Batang Gasan (1 Nagari) yaitu Nagari Gasan Gadang;

13. Kecamatan Sungai Geringging (2 Nagari) yaitu Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu dan Sungai Sirah Kuranji Hulu;

14. Kecamatan IV Koto Aur Malintang (2 Nagari) yaitu Nagari III Koto Aur Malintang dan III Koto Aur Malintang Utara.

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Nagari rentan terhadap kerawanan pangan secara umum di Kabupaten Padang Pariaman disebabkan oleh:

1. Jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk desa/kelurahan;
2. Masih banyak rumah tangga yang kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih dalam kehidupan sehari-hari;
3. Tingginya jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, sehingga masyarakat kesulitan dalam akses pangan untuk pemenuhan pangan keluarga;

Faktor yang berpengaruh di daerah rentan rawan di Kabupaten Padang Pariaman disebabkan oleh:

1. Masih banyak rumah tangga yang kesulitan dalam mendapatkan akses air bersih dalam kehidupan sehari-hari;
2. Jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk desa/kelurahan, jumlah tenaga kesehatan penting dalam penurunan angka pesakitan dan peningkatan pengetahuan mengenai gizi keluarga;
3. Tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah, menyebabkan masyarakat kesulitan dalam akses pangan untuk pemenuhan pangan keluarga sehari-hari dan kurangnya sarana dan prasarana ekonomi di desa/kelurahan;

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (nagari), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah nagari diprioritaskan pada:

- Nagari - nagari prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang (prioritas 2) dan Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kecamatan Patamuan, Kecamatan Padang Sago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Batang Gasan, Kecamatan Sungai Geringging dan Kecamatan IV Koto Aur Malintang (prioritas 3)
- Nagari-nagari yang lokasinya di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain.
- Merupakan nagari-nagari dengan keadaan geografis yang berbukit.
- Nagari dengan jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk nagari.

- Nagari yang memiliki penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah,
- Nagari yang memiliki sarana prasarana pangan yang tidak memadai.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

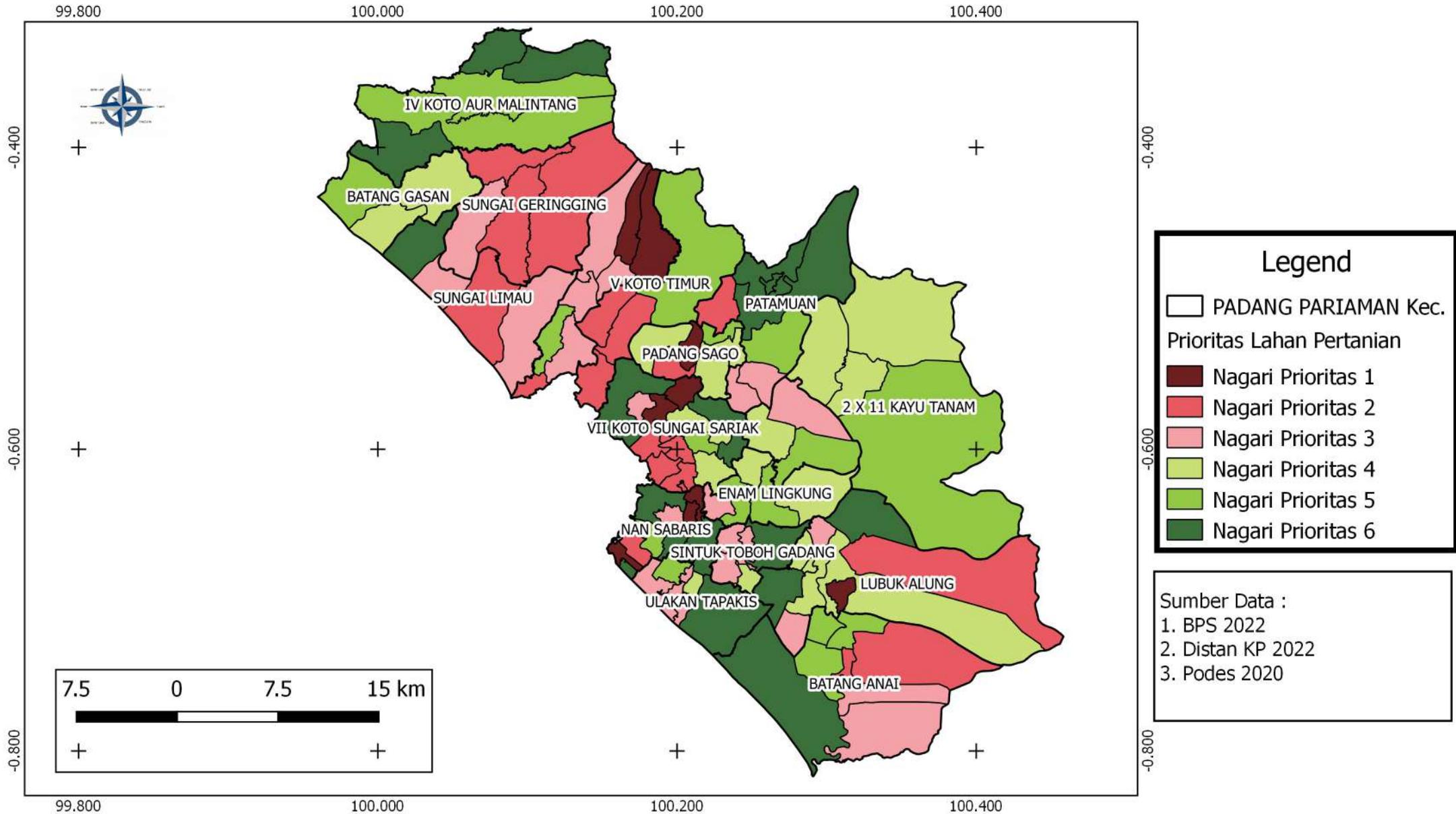


Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal seperti program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di nagari.
- b. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- d. Penyediaan tenaga kesehatan sesuai dengan jumlah dan kepadatan penduduk wilayah.



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

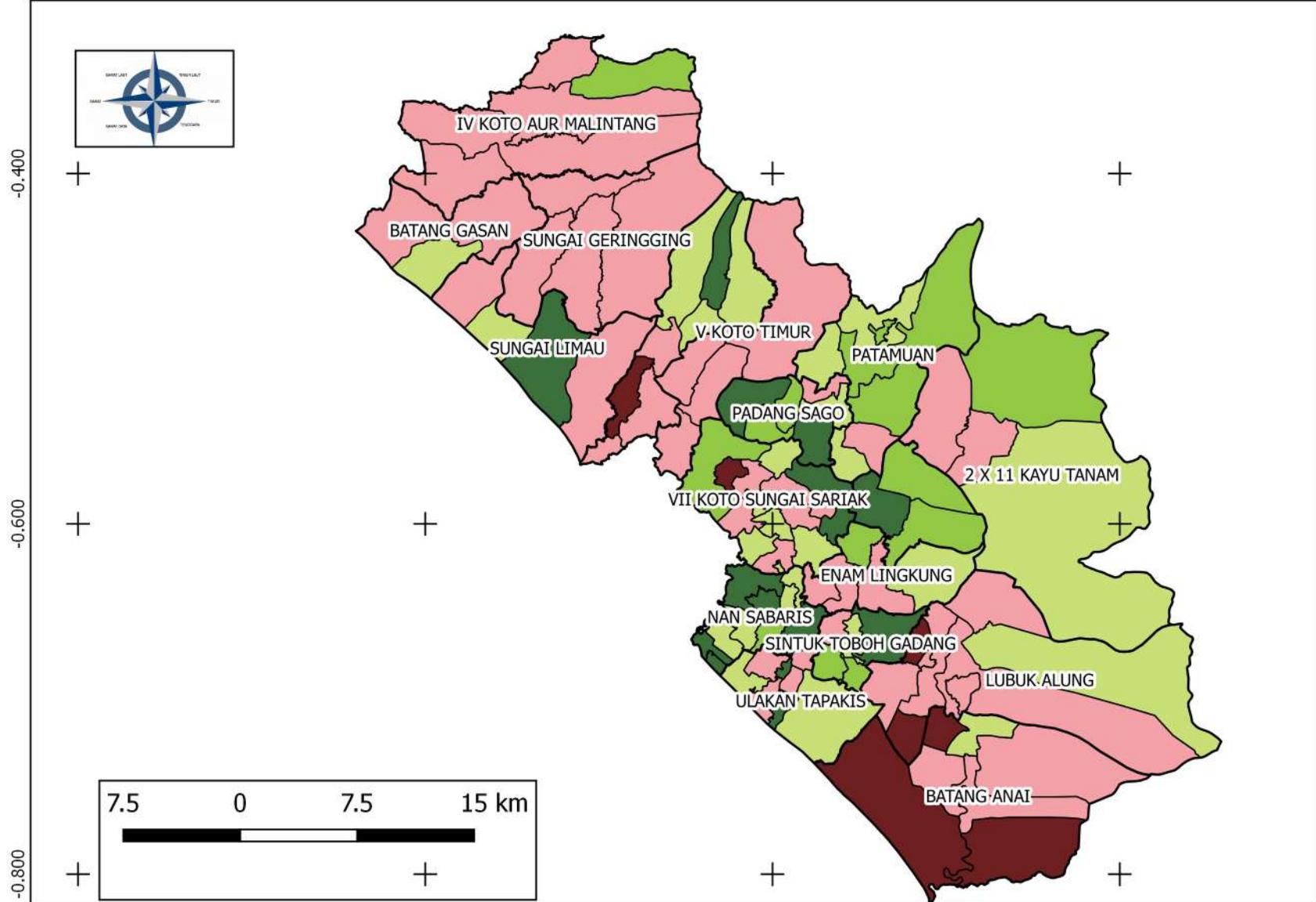




PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022



99.800 100.000 100.200 100.400



-0.400
-0.600
-0.800

-0.400
-0.600
-0.800

Legend

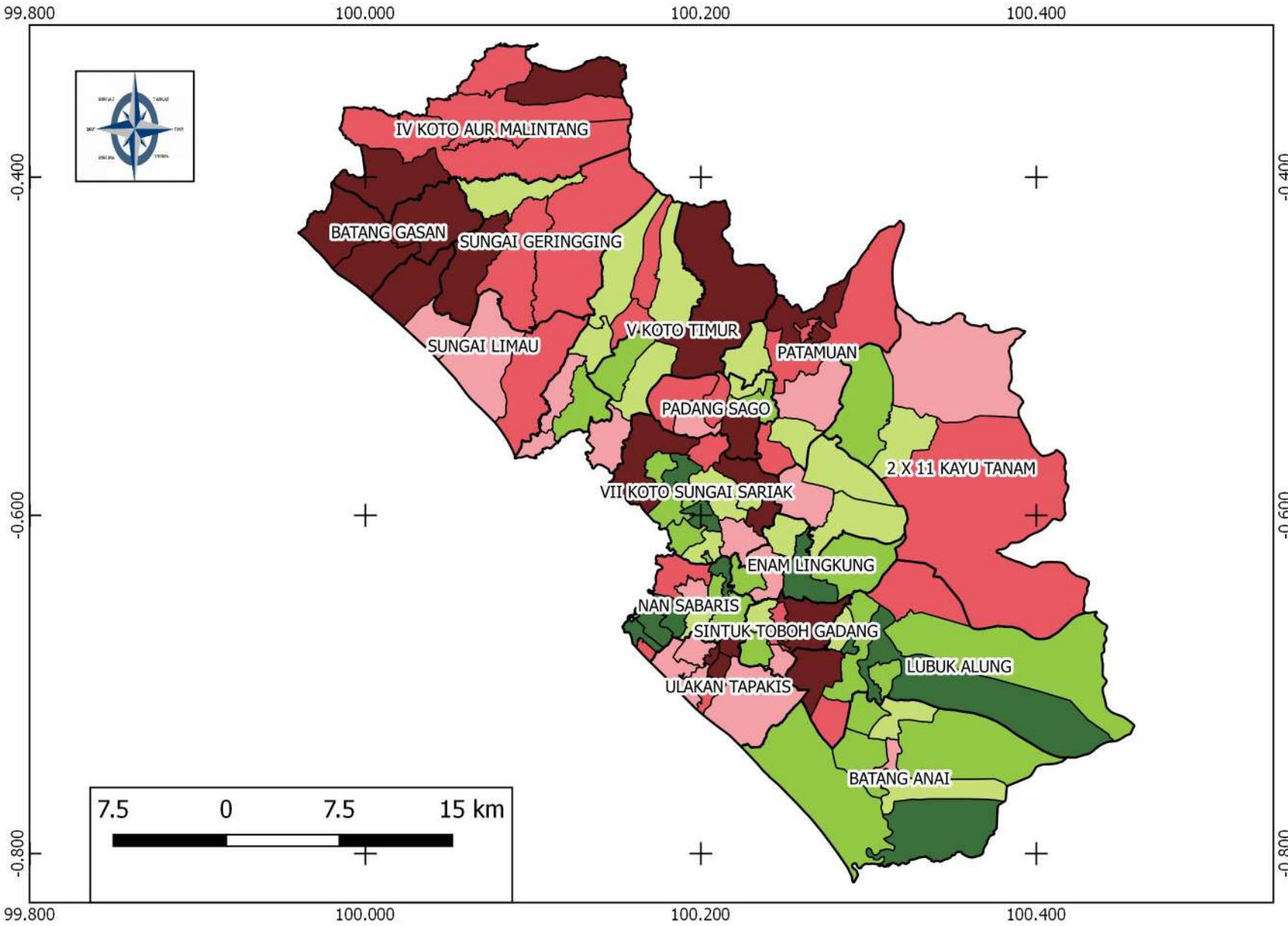
- PADANG PARIAMAN Kec.
- Prioritas Sarana dan Prasarana**
- Nagari Prioritas 1
- Nagari Prioritas 2
- Nagari Prioritas 3
- Nagari Prioritas 4
- Nagari Prioritas 5
- Nagari Prioritas 6

Sumber Data :
1. Podes 2020

99.800 100.000 100.200 100.400



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022



Legend

- PADANG PARIAMAN Kec. Penduduk Tidak Sejahtera
- Nagari Prioritas 1
- Nagari Prioritas 2
- Nagari Prioritas 3
- Nagari Prioritas 4
- Nagari Prioritas 5
- Nagari Prioritas 6

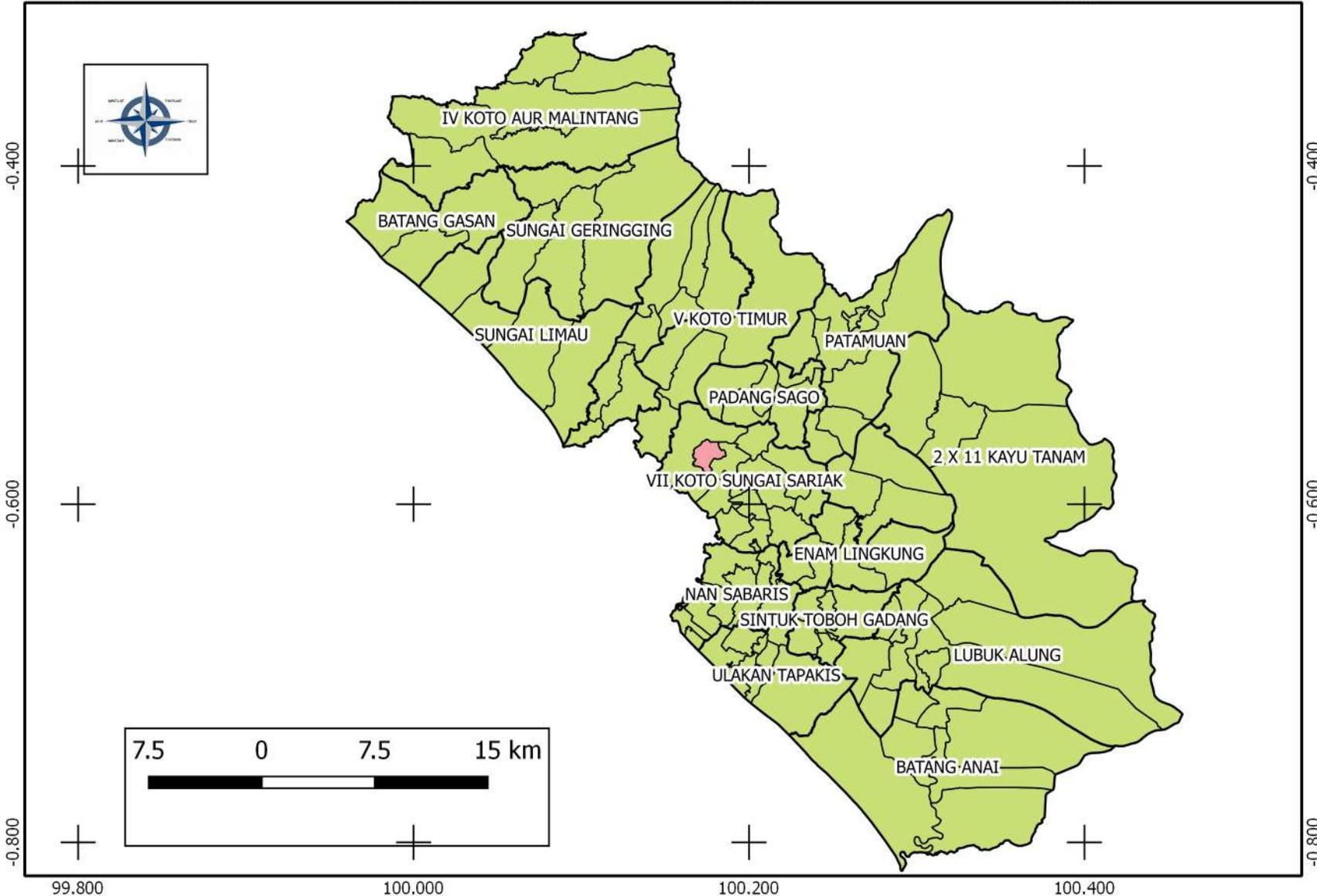
Sumber Data :
1. BPS 2022
2. Podes 2020



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022



99.800 100.000 100.200 100.400



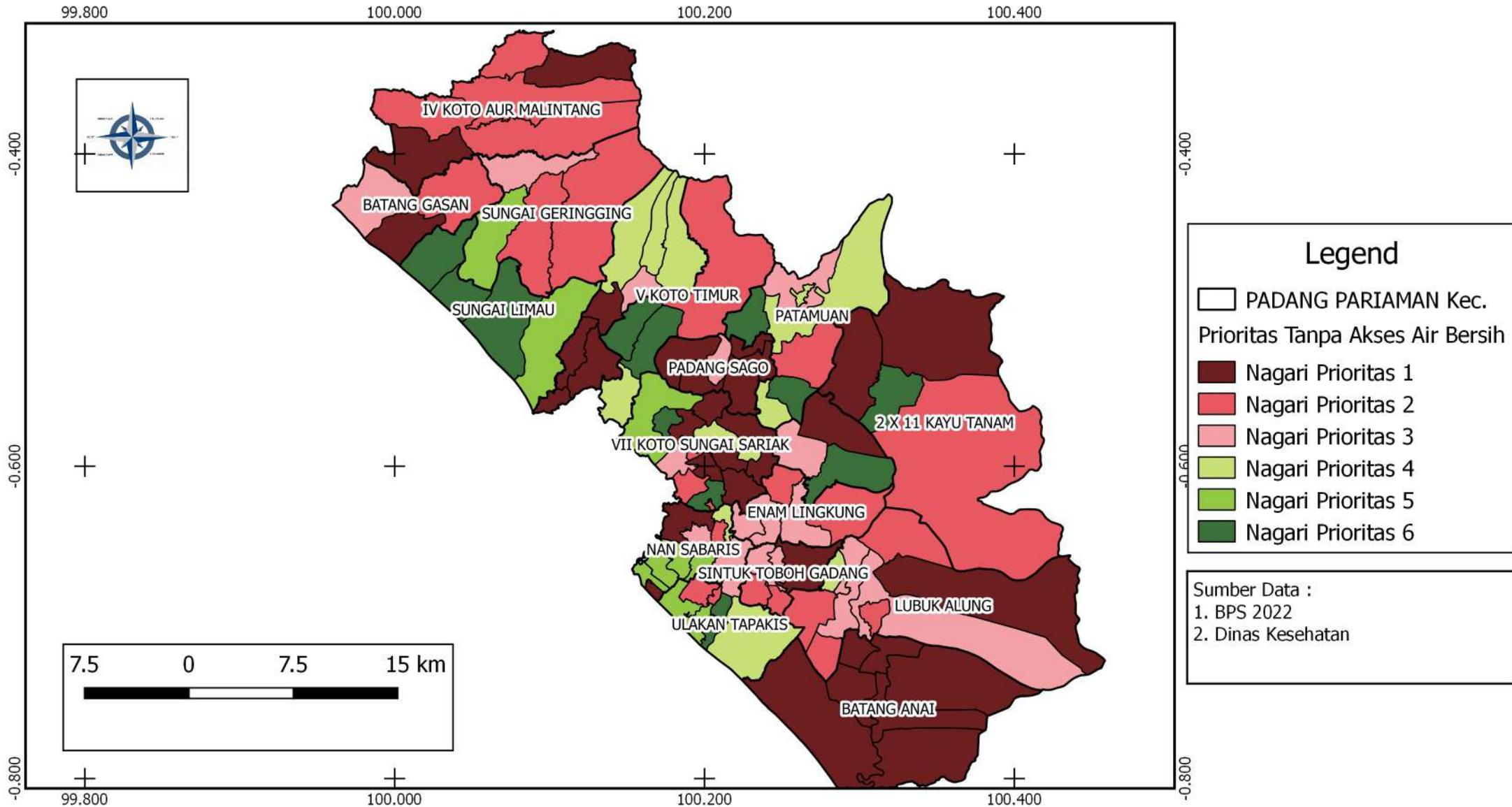
Legend

- PADANG PARIAMAN Kec.
- Prioritas Akses Penghubung**
- Nagari Prioritas 1
- Nagari Prioritas 2
- Nagari Prioritas 3
- Nagari Prioritas 4
- Nagari Prioritas 5
- Nagari Prioritas 6

Sumber Data:
1. Podes 2020



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022





PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

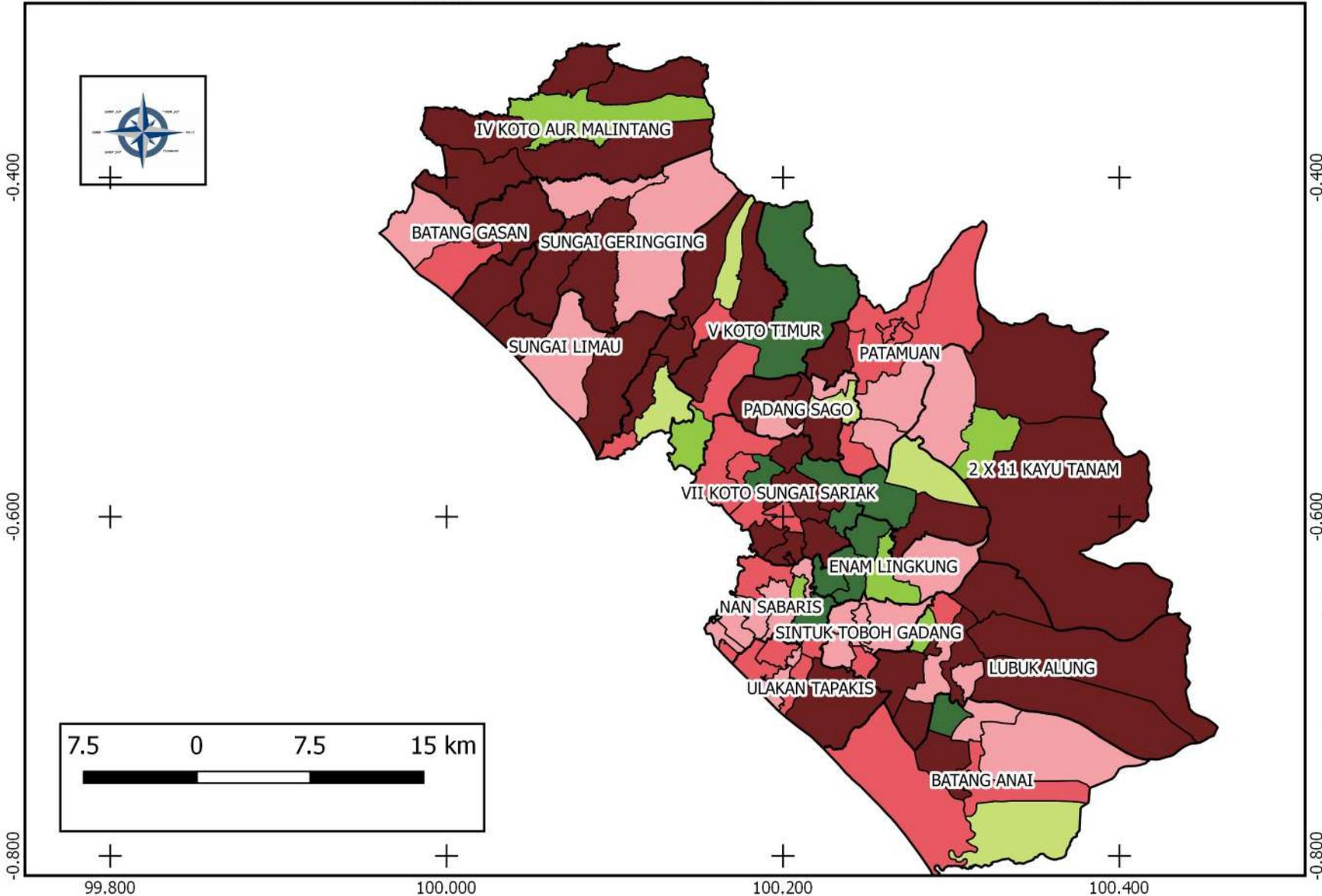


99.800

100.000

100.200

100.400



Legend

- PADANG PARIAMAN Kec.
- Prioritas Tenaga Kesehatan**
- Nagari Prioritas 1
- Nagari Prioritas 2
- Nagari Prioritas 3
- Nagari Prioritas 4
- Nagari Prioritas 5
- Nagari Prioritas 6

Sumber Data :
1. BPS 2022
2. Dinas Kesehatan

99.800

100.000

100.200

100.400

-0.800

-0.800

-0.400

-0.400

-0.600

-0.600



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

